



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

APBD Prioritas Perbaiki Jalan

Optimistis



Baru saja sebulan kita memasuki periodik tahun 2024. Sebuah tahun yang dikhawatirkan akan ada resesi ekonomi besar-besaran.

Bank Dunia dalam laporannya *“Is a Global Recession Imminent?”* memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2024. Prediksi tersebut, dikarenakan indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.

Meski demikian, kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi telah ditopang oleh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibanding negara lain.

Kita pun harus optimistis dengan apa yang akan terjadi. Dengan bersikap optimistis, maka turut memperkecil kemungkinan yang dikhawatirkan dan lebih mengutamakan upaya dan solusi. Seperti halnya kami yang selalu optimistis menyajikan bacaan kepada seluruh pembaca Cirebon Katon.

Sebagai mitra legislator, edisi kedua di tahun ini, kami menyajikan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon beserta program fokus yang dicanangkan selama 2024.

Selain versi cetak, kami telah menyediakan majalah Cirebon Katon versi digital yang dapat diakses melalui laman: <https://majalahcirebonkaton.com>.

Kami sangat menanti, masukan, kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk kemajuan majalah Cirebon Katon ini. Selamat membaca. Salam Cirebon Katon!



PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

PENGARAH :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

drh. Encus Suswaningsih M.Si
(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

REDAKSI AHLI :

S. Yudi

REDAKTUR :

Yusuf

REPORTER :

• **Riyan • Amir**

FOTOGRAFER :

Qusoy

DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

DATA DAN RISET :

Oman

DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

KORESPONDENSI:

redaksi.cika@gmail.com

PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Prioritas Perbaikan Jalan
APBD 2024 Ditetapkan 3,6 Triliun

6 | Targetkan Perbaikan di Enam Ruas Jalan



14 | KILAS

Bahas Retribusi Parkir



18 | PUBLIKA

Aduan Jembatan Ambruk



22 | LENSA

Bangkit dari Pandemi
Bisnis Kerupuk Rambak Kembali Menggeliat



24 | PROFIL

Mohamad Suharsono
Hobi Nulis Jadi Kreator TV

28 | DINAMIKA

Komisi I Pastikan Bisnis Hiburan Taat Aturan

30 | Sosialisasi Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila

32 | Komisi II Minta PLN Cirebon Tingkatkan Setor Pajak

34 | Soroti Sistem Rujukan Puskesmas Losari



36 | POTENSI

Dulu Tempat Buang Limbah,
Sekarang Jadi Taman Indah



38 | DESA

Rawaurip
Punya Aplikasi Pelayanan Digital

Prioritas Perbaikan Jalan APBD 2024 Ditetapkan

DPRD berharap, Pemkab Cirebon dapat mengoptimalkan penggunaan APBD 2024 untuk pembangunan program populis seperti perbaikan jalan.



Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang dihantarkan pada September 2022 lalu akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah pada November 2022.

Meski sempat mengalami skorsing selama 1 jam karena tidak memenuhi kuorum, rapat akhirnya baru disahkan setelah kehadiran 34 anggota dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengetuk palu sebagai tanda disahkannya APBD 2024.

Total rancangan APBD 2024 yang disepakati berjumlah Rp 3,6 triliun atau Rp 3.643.504.757.377.804.

Jumlah tersebut, terpaut jauh dari perkiraan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 yang dicanangkan semula senilai Rp 4,6 triliun.

Jika dirinci, nilai APBD 2024 dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 810 miliar. Berasal dari pajak daerah Rp 323 miliar, retribusi daerah Rp 19 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13 miliar, dan pendapatan lain yang sah Rp 455 miliar.

Sementara pendapatan dana transfer APBN senilai Rp 2,61 triliun atau Rp 2.617.158.429.902, dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 332 miliar.



Jika dilihat, pendapatan dana transfer mengalami penurunan dibanding pada tahun 2022 yang sebesar Rp 2.64 triliun atau Rp 2.642.773.360.000.

Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mengalami kenaikan menjadi Rp 3,6 triliun. Hal itu meliputi belanja operasional sebesar Rp 2,65 triliun, belanja modal Rp 236 miliar, belanja tak terduga Rp 15 miliar dan belanja transfer Rp 697 miliar.

Bupati Cirebon Drs Imron Mag mengatakan, anggaran belanja daerah akan digunakan untuk urusan pemerintahan serta penanganan dampak pandemi

Covid-19.

Oleh karenanya, belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, seperti pelayanan dasar, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid 19.

“Pembangunan infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu program yang perlu ditingkatkan, karena diharapkan oleh masyarakat banyak. Dan ini menjadi skala prioritas,” ujar Imron.

Meski demikian, jika dilihat jumlah kebutuhan APBD 2024 terdapat defisit sebesar Rp 106 miliar. Namun hal itu telah tertutupi oleh penerimaan pembiayaan sisa lebih anggaran (silpa) tahun 2022 sebesar Rp 106 miliar. Dengan demikian silpa APBD 2024 berjumlah nol.

Berikutnya, belanja modal yang sebelumnya dipatok Rp 230 miliar, pada tahun 2024 naik dengan selisih Rp 6 miliar.

Luthfi menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya APBD 2024 akan dikirim ke provinsi untuk dievaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Nanti hasil evaluasi tersebut akan disempurnakan oleh banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan peraturan daerah,” jelas Luthfi.

Luthfi pun menyarankan, pemerintah daerah harus berkonsentrasi menanggulangi dampak pandemi covid-19 dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan.

Senada itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST berharap, pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan secara terintegrasi seperti penanganan pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, pelayanan kesehatan, penyelesaian infrastruktur, pemulihan sektor perekonomian dan pembangunan berbasis kewilayahan.

“Itu semua menjadi masalah populis yang sekarang harus segera ditangani oleh Pemkab Cirebon. Terutama perbaikan jalan,” ujar Sofwan. •Par

Targetkan Perbaikan di Enam Ruas Jalan

Sejumlah ruas jalan menjadi skala prioritas perbaikan di tahun 2024
Dari Lemahtamba hingga Ciledug. Seperti apa?



Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sembilan program prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam APBD 2024.

Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka SH mengatakan, DPRD telah meminta Pemkab Cirebon untuk memprioritaskan penanganan masalah sampah, banjir, infrastruktur dan penanganan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Intinya kami sudah masukan ke dalam plafon KUA-PPAS tersebut agar menjadi perhatian besar untuk pemkab," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi juga menyarankan, agar di tahun 2024 pembenahan infrastruktur dikerjakan secara bertahap. Meski anggaran terbatas, jalan merupakan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

"Jalan yang berlubang ini kan kebutuhannya

sangat besar, tapi kita tahu anggarannya terbatas. Tapi saya katakan dalam forum banggar, kita butuh keseimbangan infrastruktur," jelas Luthfi.

Sejumlah ruas jalan pun akan menjadi skala prioritas perbaikan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan mengungkapkan, perbaikan akan dilakukan di Jalan Tegalsari, Lemahtamba, Cangkring, Pabuaran, Jatiseeng hingga Ciledug.

"Itu enam ruas jalan yang kita targetkan bisa diselesaikan di tahun ini," ungkap politisi Hanura itu.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron M Ag mengatakan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada 2024 antara lain, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung pembangunan SDM unggul, serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat.

Kesembilan program prioritas tersebut, pertama, peningkatan akses kualitas pendidikan dari partisi-



pasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Meliputi rehabilitasi prasarana, pembangunan sekolah berwawasan lingkungan serta pendidikan paket kesetaraan.

Kedua, perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.

“Jaminan kesehatan merupakan hal prioritas. Alhamdulillah kemarin kita sudah anggarkan 160 miliar untuk 350 ribu peserta BPJS melalui APBD,” ujar Imron.

Ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.

Melalui program tersebut, diharapkan ada peningkatan daya saing industri, penguatan neraca dagang, pemberdayaan UMKM, percepatan investasi daerah, penguatan ketahanan pangan, revitalisasi pembangunan pertanian, peningkatan produksi dan pemasaran perikanan serta pengembangan sektor wisata.

Keempat, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan

masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Dinsos akan memfasilitasi perlindungan sosial melalui kartu PEPEK, peningkatan kapasitas SDM Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelayanan bidang sosial.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mencanangkan program perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan untuk menekan angka pengangguran.

Dinas Ketenagakerjaan akan berupaya melalui peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan program magang, serta sinergitas pengawasan ketenagakerjaan.

Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, pengembangan ketersediaan ruang terbuka hijau, serta pembinaan dan pengendalian tata ruang.

Ketujuh, reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Pemkab Cirebon berencana memenuhi sarana perekaman dan pencetakan e-KTP, penjangkaran dan fasilitasi pendaftaran penduduk, peningkatan fasilitas sarana layanan, serta kapasitas aparatur kecamatan.

Selanjutnya, program peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama yang digawangi Kesbangpol.

Terakhir, program pembenahan infrastruktur. Dimulai dari peningkatan pengembangan air bersih dan sanitasi, rutilahu, penerangan jalan umum (PJU) dan sarana lalu lintas, serta pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan. •Par

Anggaran Perbaikan Jalan Pemerintah Diminta Kreatif

Meski anggaran perbaikan jalan dalam APBD terbatas, Teguh menilai, perbaikan jalan harus menjadi skala prioritas yang harus dilakukan secara bertahap.



Dari sembilan isu strategis APBD 2024 Kabupaten Cirebon, memuat program perbaikan dan peningkatan jalan yang menjadi skala prioritas. Bukan tanpa alasan, kerusakan jalan telah menjadi pekerjaan rumah yang mencekam. Penyebabnya pun bermacam mengapa jalan mudah rusak. Salah satunya, karena volume kendaraan dan muatan yang *over* kapasitas.

“Faktor yang membuat cepat rusak, pertama dari volume kendaraan, kedua tonase muatan yang *over* kapasitas, dan cuaca yang tidak menentu. Jadi jalan di kita mudah sekali rusak,” jelas Yoga Setiawan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.

Sementara penanganan kerusakan jalan selama 2 tahun pun dinilai belum optimal karena terbatasnya anggaran.

“Kendala selama ini di infrastruktur jalan yang

jelas itu anggaran. Jadi anggaran kita sangat-sangat tidak memadai dari jumlah ruas jalan yang ada. APBD sangat terbatas untuk menangani jalan di Kabupaten Cirebon tidak memadai,” tuturnya.

Yoga mengaku, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon telah meminta bantuan ke Pemprov Jabar hingga pusat untuk memperbaiki kerusakan jalan secara bertahap pada 2022. Hasilnya, Kabupaten Cirebon menerima bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi Jawa Barat.

“Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk perbaikan jalan di tiga ruas jalan Plumbon sampai Kenanga, Luwungkencana dan Jagapura,” ungkap Yoga.

Hal itu pun diakui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan.

“Ya kita dapat bantuan Rp 30,7 miliar dari DAK provinsi dan ditambah dari APBD Rp 81 miliar. Jadi



di tahun lalu untuk perbaikan jalan sekitar Rp 111 miliar,” ujar Tomy.

Tomy mengakui, anggaran perbaikan jalan dari APBD belum dapat memenuhi seluruh kerusakan jalan. Terlebih ada kebutuhan lain yang juga mendesak seperti pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan. “Makanya di tahun 2022 dari 564 ruas jalan, baru 200 jalan saja yang direkonstruksi. Sisanya kita harapkan bisa diselesaikan antara periode 2024 dan 2024,” jelasnya.

Hal itu diakibatkan adanya *refocusing* anggaran sejak tahun 2020. Tak heran jumlah jalan rusak yang semula di tahun 2020 hanya sepanjang 69 kilometer, di tahun 2021 meningkat menjadi 101,5 kilometer karena tidak adanya penanganan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka SH mengatakan, dalam proses penyusunan APBD 2024, ia bersama tim Banggar telah mendorong agar penanganan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara bertahap, dengan melihat kemampuan anggaran daerah. “Kita juga harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengharuskan sektor utama pendidikan, kesehatan. Baru nanti akan dipotong untuk hal-hal lain seperti infrastruktur,” kata dia.

Namun, Teguh menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon tak hanya mengandalkan APBD untuk menangani kerusakan jalan.

“Karena sudah tahu APBD terbatas. Maka harus atur strategi dan kreatif, misalnya dengan meminta perusahaan turut membantu perbaikan jalan,” jelas Teguh.

Lebih lanjut, Politisi Golkar itu juga menyampaikan, di tahun 2024 Gubernur Jawa Barat



Ridwan Kamil telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk perbaikan ruas jalan di Jawa Barat.

“Tapi kita belum tahu berapa untuk Kabupaten Cirebon yang akan diperbaiki,” tambahnya.

Pada paripurna kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), anggaran penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar semula diren-

anakan Rp 307,6 miliar. Namun dalam APBD 2024, alokasi penanganan masalah akhirnya disepakati Rp 100 miliar.

“Kurang lebih kami sudah menganggarkan sekitar Rp 100 miliar lebih di tahun 2024. Kami juga memprioritaskan beberapa titik seperti perbaikan Jalan Cangkring, Tegalsari, Lemahtamba, Pabuaran sampai Ciledug yang sudah sangat memprihatinkan,” pungkas Yoga. •Par

Yoga:

Komitmen Jalan Rusak Parah Beres Tahun Ini

Kerusakan jalan tercatat sepanjang 50 km. DPRD berkomitmen perbaikan jalan akan diselesaikan tahun ini. Benarkah?



Kerusakan dan kenyamanan jalan rusak tak henti dikeluhkan masyarakat. Rasta Ade Saputra (32), warga Desa Gembongan Mekar mengeluh setiap akan berangkat kerja. Rasta bekerja di stasiun kereta api (KAI) Babakan, yang melewati Jalan Gembongan Mekar-Babakan dengan penuh lubang menganga.

“Sangat mengganggu. Jalan jadi macet, debu juga makin banyak, ditambah kalau tidak hati-hati motor bisa rusak karena benturan jalan,” keluhnya.

Pria yang bekerja menjadi security itu pun sangat terganggu atas kondisi tersebut. “Bikin lama kalau lewat jalan situ. Pokonya sangat menghambat,” ujarnya.

Belum lagi saat musim penghujan tiba, jalan berlubang itu tergenang air. Rasta pun harus lebih berhati-hati karena dapat membahayakan. Ia hanya berharap pemerintah benar-benar perhatian atas kondisi tersebut. “Iya kalau saya sarannya perbaikan jalan itu harus dengan material yang berkualitas biar awet. Semoga jalan jadi bagus lagi. Kalau bisa beton,” pintanya.

Tak hanya dialami Rasta yang berharap akan perbaikan jalan. Kuwu Desa Guwa Kidul Ade Firdaus juga berharap, perbaikan jalan di desanya bisa segera dilakukan. Pasalnya, hampir 2 kilometer Jalan Bandar Kaliwedi mengalami kerusakan parah.



Bahkan sebagian telah amblas. Padahal jalan tersebut merupakan penghubung 2 desa dan sangat vital bagi lalu-lalang warga.

Para warga pun berinisiatif menambal lubang-lubang jalan dengan menggunakan material seadanya.

“Dari pada membuat kecelakaan, warga pun inisiatif tambal dengan semen. Kalau jalan yang amblas itu sudah lama tapi memang tidak ada penanganan, padahal cukup parah. Panjangnya sekitar 50 meter, dengan kedalaman 30 cm,” kata Ade.

Ade mengungkapkan, akibat kerusakan jalan tersebut kecelakaan lalu-lintas pun tak jarang terjadi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon segera melakukan tindakan.

“Saya harap pemerintah bisa cepat memperbaiki jalan itu, karena Jalan Bandara merupakan jalan utama warga saya menuju Kaliwedi,” tuturnya.

Ade pun menawarkan agar pemerintah daerah member-

dayakan pemerintah desa agar realisasi perbaikan jalan dapat optimal.

“Menurut saya pemerintah daerah tidak perlu repot-repot cari kontraktor, perdayakan saja desanya. Biar mereka yang ngurus, saya yakin akan lebih maksimal karena itu untuk kebutuhan mereka sendiri,” ujarnya.

Seperti diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon mencatat, ada 564 ruas jalan dengan panjang 1.240 kilometer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya kerusakan jalan diakui mencapai 101 km pada tahun 2021. DPUTR melaporkan telah memperbaiki hingga tersisa 50 km pada 2022.

Sementara dalam APBD 2024, Pemkab Cirebon telah mengalokasikan Rp 100 miliar lebih untuk perbaikan jalan.

Wakil Ketua Komisi III Yoga Setiawan SE mengatakan, kelu-

han masyarakat terbanyak selalu mengenai kerusakan jalan. Ia pun tak heran, karena jalan merupakan sektor utama.

Yoga menerangkan, dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBD 2024, diharapkan akan memenuhi seluruh kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon untuk diperbaiki. Ia pun meminta agar seluruh pihak bersabar karena ada prosedur yang harus ditempuh. Terutama kesadaran masyarakat.

“Sebagai pengguna jalan kita juga harus sabar karena semua ada prosedurnya,” jelas Yoga.

Ia mengaku, telah mendorong DPUTR agar proses pelelangan perbaikan jalan segera direalisasikan.

Yoga berkomitmen ruas jalan yang mengalami kerusakan parah bisa diselesaikan di tahun 2024. “Kami berkomitmen di tahun 2024 ini bisa menyelesaikan PR ini,” jelasnya.

Meski demikian, kata Yoga, selain memperbaiki jalan, tak kalah penting harus ada upaya menekan penyebab kerusakan jalan. Salah satunya, perlunya tindakan tegas oleh pemerintah daerah terhadap kendaraan yang *over* kapasitas.

Kendaraan dengan muatan yang berlebih akan mengakibatkan jalan cepat rusak. Seperti yang terjadi di ruas Jalan Abu Khaer, Bojong Negara hingga arah Pabedilan. Jalan dengan panjang hampir 3 kilometer tersebut rusak diakibatkan kendaraan bermuatan material pabrik.

“Pemerintah bisa kerjasama dengan dishub setempat, untuk melakukan tindakan pada kendaraan bermuatan yang *over load*. Jadi tidak hanya memperbaiki tapi mencegah kerusakan jalan itu cepat terjadi,” pungkas Yoga. •Par

Sembilan Program Utama 2024

1

Peningkatan akses kualitas pendidikan dari partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Meliputi rehabilitasi prasarana, pembangunan sekolah berwawasan lingkungan serta pendidikan paket kesetaraan.

2

Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.

3

Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.

4

Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Dinsos akan memfasilitasi perlindungan sosial melalui kartu PEPEK, peningkatan kapasitas SDM Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelayanan bidang sosial.

5

Program perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan untuk menekan angka pengangguran.

6

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, pengembangan ketersediaan ruang terbuka hijau, serta pembinaan dan pengendalian tata ruang.

7

Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Pemkab Cirebon berencana memenuhi sarana perekaman dan pencetakan e-KTP, penjangkauan dan fasilitasi pendaftaran penduduk, peningkatan fasilitas sarana layanan, serta kapasitas aparatur kecamatan.

8

Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama yang digawangi Kesbangpol.

9

Program pembenahan infrastruktur. Dimulai dari peningkatan pengembangan air bersih dan sanitasi, rutilahu, penerangan jalan umum (PJU) dan sarana lalu lintas, serta pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.

Sumber: APBD 2024



#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Bahas Retribusi Parkir

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat dengan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon mengenai pendapatan retribusi parkir. Komisi III menilai, pendapatan sektor parkir belum memenuhi target yang diharapkan, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana berpendapat, Peraturan Daerah (Per-

da) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir perlu peninjauan ulang. Menurutnya, perda harus segera direvisi untuk mempertajam dan memperluas pendapatan dan retribusi parkir.

“Ya kami melihat Perda itu sudah usang, harus ada pembaharuan untuk meningkatkan pendapatan parkir sehingga berdampak pada pemasukan PAD. Kita lihat retribusi parkir sejauh ini belum maksimal. Kita sedang godok apakah perlu perubahan perda,” ujarnya.



Hadiri Pelantikan Anggota PPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Stadion Ranggajati, Sumber. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi mengatakan, dari total pendaftar 5000 orang, terjaring 1.272 orang yang akhirnya terpilih menjadi anggota PPS.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi yang turut hadir menyampaikan, selamat atas terpilihnya para penyelenggara pemilu tingkat desa. Luthfi berharap, anggota PPS ini bisa

mengemban amanah untuk turut mensukseskan Pemilu 2024 kedepan. Luthfi mengatakan, kinerja PPS sangat berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu.

“Sesuai yang dikatakan Ketua KPU, PPS harus sukses dalam bekerja dan sukses dalam kinerja. Kita berharap suksesnya teman-teman PPS sangat berdampak bahwa lahirnya pemimpin eksekutif dan legislatif adalah mereka putra terbaik di Kabupaten Cirebon,” ujar Luthfi.



Apresiasi Muscab Perdana PPDI

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri musyawarah cabang (Muscab) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon di aula gedung UPT Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lemahabang.

Pada muscab perdana PPDI tersebut, Luthfi mengapresiasi serta menyampaikan sejumlah poin strategis untuk PPDI. Luthfi mengatakan, PPDI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupa-

ten Cirebon dalam turut serta menyusun kebijakan mengenai penyandang disabilitas.

Oleh karenanya, kepengurusan yang baru diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Cirebon. “Melalui teman-teman PPDI ayo bareng-bareng dengan pemerintah mewujudkan kebijakan yang berpihak untuk para penyandang disabilitas dan seluruh anggota PPDI. Pemerintah juga wajib melibatkan kawan-kawan,” ujar Luthfi.



Serap Aspirasi Pemekaran DOB

Jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi pegiat Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) menindaklanjuti rencana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

Dalam kesempatan itu, FCTM yang diketuai Usamah Manshur meminta agar DPRD Kabupaten Cirebon membentuk Pansus pemekaran Cirebon timur. Ia menjelaskan, langkah tersebut perlu segera dilakukan agar Kabupaten Cirebon Timur bisa masuk da-

lam salah satu wilayah yang mandiri sebagai DOB.

“Kami menargetkan Februari mendatang pansus sudah bisa dibentuk,” jelas Usamah.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menyambut baik rencana pemekaran yang terus diakselerasi oleh para pegiat FCTM sejauh ini.

“Pada prinsipnya kami di DPRD mengharapkan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Luthfi.



Aduan Jembatan Ambruk

Assalamu'alaikum Wr Wb

Pasca hujan lebat yang melanda Cirebon akhir-akhir ini, telah mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir dan infrastruktur mengalami kerusakan. Salah satunya di Desa Penpen, Kecamatan Mundu. Jembatan penghubung di desa kami mengalami kerusakan. Akibatnya saat ini akses jalan terganggu.

Padahal jembatan ini merupakan penghubung antar desa. Sementara ini jembatan telah diperbaiki oleh warga dengan swadaya. Namun kami berharap bisa dibenahi agar tak terjadi ambruk kembali.

Mohon kepada Bapak/Ibu DPRD Kabupaten Cirebon yang terhormat agar bisa meninjau lokasi dan mendorong perbaikan jembatan secepatnya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Riyan/Pegawai/Penpen)



Perlu Penertiban Sewa Sepeda Listrik

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Sopari, warga Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura. Saya ingin mengeluhkan perihal penggunaan sepeda listrik di desa saya yang mulai marak akibatnya hadirnya jasa sewa.

Para pengguna jasa itu pun kebanyakan anak-anak. Setelah banyak kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik. Salah satunya kejadian di Jalan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet. Pengendara sepeda listrik menabrak pengguna sepeda motor.

Saya tidak tahu siapa yang salah. Namun karena pengguna sepeda listrik kebanyakan anak-anak, saya kira perlu ada penertiban penggunaan sepeda listrik.

(Sopari/Pedagang/Sidamulya)

Keluhan Perbaikan BPJS Terhambat

Saya Anisa dari Plered. Saya ingin mengeluhkan mengenai perbaikan BPJS yang lama. Sudah dari bulan November tahun lalu saya mengajukan perbaikan BPJS, namun hingga kini belum juga dibenahi.

Akibatnya BPJS saya masih nonaktif dan tidak dapat digunakan. Padahal BPJS merupakan pelayanan mendasar karena sangat dibutuhkan terutama untuk berobat saya. Saya berharap Bapak/Ibu dewan bisa membantu agar perbaikan BPJS bisa cepat.

Terima kasih sebelumnya kepada reporter Cirebon Katon yang berkenan menerbitkan keluhan saya.

(Anisa/Mahasiswi/Plered)



Aduan Blanko KTP Kosong

Terimakasih sebelumnya kepada tim Cirebon Katon. Saya Yahya (bukan nama sebenarnya), asal Desa Depok, Kecamatan Depok. saya ingin mengadukan soal perbaikan KTP yang lama sekali, selalu saja alasan dari pihak kecamatan karena blanko kosong maupun alatnya rusak dan sebagainya.

Sebagai warga biasa, saya tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Apakah blanko kosong itu benar atau hanya mengada-ada. Sebagai mahasiswa saya sangat membutuhkan KTP untuk mengurus kebutuhan beasiswa dan lainnya.

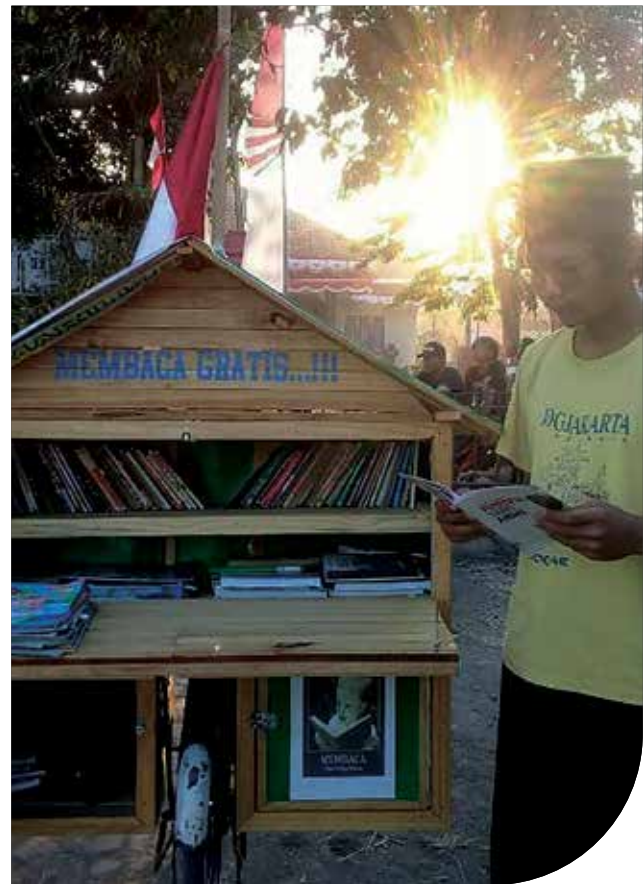
Saya mohon bapak/ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon bisa mengaudit dan mendorong agar pelayanan cetak KTP bisa mudah dan cepat.

(Yahya/Mahasiswa/Depok)

Muhammad Assegaf

Bawa Ontel, Demi Tingkatkan Minat Baca

Dengan menggunakan sepeda ontel, Assegaf mewakafkan hidupnya untuk meningkatkan literasi anak-anak. Ia pun membawa bacaan buku gratis untuk diijakan. Bagaimana kisahnya?



Di tengah terik panasnya matahari Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sesosok pemuda mengayun sepeda ontel. Assegaf menaiki ontel yang dibuat khusus untuk menawarkan buku bacaan bagi anak-anak.

Pemilik nama lengkap Muhammad Assegaf ini, hampir di seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk berkeliling dari satu desa ke desa lain menggunakan ontel. Membuka lapak bacaan buku gratis, yang ia namakan Sepeda Pustaka Literasi Pelajar

Tegalgubug.

Sebelum berangkat, ia menata buku-bukunya terlebih dahulu di dalam kotak yang sudah terpasang di ontelnya. Ada banyak ragam genre buku, dari mulai cerita-cerita anak hingga panduan memasak. Itu dia lakukan hampir setiap pagi.

"Saat ini, buku yang ada di lapak saya sudah mencapai 300 eksemplar, dengan berat sekitar 1 kwintal," kata pria 25 tahun itu.

Perjalanannya dalam mengarungi dunia literasi



tak selalu mulus. Sepanjang proses itu ia telah bergulat dan bergelut yang terkadang lucu, namun lebih sering tidak. Persoalan dan hambatan kerap datang. Bahkan, saat pertama kali ia melapak buku kendala yang dihadapi justru roda ban sepeda ontelnya lepas, buku-bukunya pun jatuh berserakan di tengah jalan.

“Saya juga sempat diremehkan masyarakat terlebih dahulu,” kenangnya menceritakan.

Tetapi hal tersebut tak membuatnya patah arang. Ia tetap mendorong sepeda ontelnya meski dengan peluh membanjiri tubuhnya.

Bahkan tak sedikit orang menilai bahwa perjuangannya dalam melapak buku sebagai sesuatu yang mulia. Karena menganggap gerakan tersebut telah lenyap dan sudah amat jarang sekali pemuda yang masih memiliki kepedulian terhadap perubahan generasi ke

arah lebih baik.

“Saat saya mengelilingi jalan Gegesik, saya menuntun sepeda ontel karena bannya bocor. Ada seseorang yang prihatin melihat saya, tetiba orang tersebut menyodorkan uang Rp 50 ribu. Ia tidak mengenalkan identitasnya, tetapi ia bilang untuk uang lelah,” tuturnya.

Perjalanan Assegaf tak lepas dari peran seorang mentor bernama Nirwan Arsuka. Pada momen Indonesia Internasional Book Fire (IIBF) yang diselenggarakan di Jakarta, dihadiri 17 negara ia pertama kali menerima petuah oleh Nirwan Arsuka untuk segera menorehkan sejarah hidupnya.

“Setelah selesai acara IIBF, saya diajak makan siang lalu beliau cerita tentang perjalanannya dalam mendirikan Pustaka Bergerak. Lalu setelah itu, beliau berpesan kepada saya, perjala-

nan kamu itu bukan ditulis oleh orang lain, tetapi harus ditulis oleh diri kamu sendiri. Hal itu lah yang membakar semangat saya untuk terus bergerak dalam bidang literasi ini,” jelasnya.

Sepulang dari acara tersebut, Assegaf terpacu untuk membentuk satu gerakan literasi di desanya. Semangat yang menggelegak dan segudang harapan untuk menghapus kebodohan generasi masa mendatang.

Dari perjalanan itu, tak kurang dari sebulan lapaknya sudah banyak didatangi oleh anak-anak di sekolah. Para guru juga menyambut positif. Tak hanya buku disajikan, melainkan permainan anak-anak, belajar mewarnai, menghafal nama-nama presiden juga lagu wajib nasional.

“Suasana saat saya datang ke sekolah, anak-anak menyambutnya dengan gembira. Ada sekitar 40 anak mengelilingi lapak saya. Bahkan para guru pun merespon positif dan menyumbangkan buku-buku bacaannya, ada yang kasih 5 sampai 10 buku yang saya terima,” katanya.

Kini, ia sudah melebarkan sayap dengan bergabung dengan komunitas-komunitas para pecinta literasi. Bukan hanya dari komunitas sepeda, ada juga dari komunitas pendaki pustaka, pustaka 72, pustaka cahaya bumi dan pustaka 97. Semuanya tergabung dalam pecinta literasi di Cirebon.

“Saya sekarang sudah gabung dengan komunitas pecinta literasi Cirebon, dari daerah Gegesik, Susukan dan Palimanan guna membahas gerakan dan membangun gerakan-gerakan kecil di seluruh pelosok desa. Kita juga tak jarang saling bertukar buku agar buku terus diperbaharui,” ujar pria yang juga aktif di IPNU Kabupaten Cirebon itu. •Iz



Bangkit dari Pandemi Bisnis Kerupuk Rambak Kembali Menggeliat

Kesibukan di dapur produksi kerupuk rambak milik Asiri (45) warga Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered mulai terlihat sejak pukul 7 pagi. Bersama lima karyawannya, Asiri akan mengolah puluhan kilogram kulit sapi dan kerbau sebagai bahan dasar membuat kerupuk rambak.

Dalam sekali produksi, Asiri mampu menghasilkan 35 kg kerupuk. Selanjutnya ia akan menjualnya ke pasar lokal maupun luar daerah.

“Kita sudah punya pasar hingga ke luar daerah,”

ujar Asiri.

Hadir dengan cita rasa asin nan gurih, kerupuk rambak dikenal dengan kerenyahan yang menarik. Bisnis tersebut, merupakan usaha turun temurun yang Asiri geluti sejak sepuluh tahun silam.

Mulanya Asiri hanya membantu bisnis orang tuanya. Sepeninggal orang tua, Asiri kemudian meneruskan bisnis tersebut hingga sekarang. Dalam sebulan, Asiri pun meraup omzet hingga belasan juta rupiah dari penjualan kerupuk rambak. •Mir





Mohamad Suharsono

Hobi Nulis Jadi Kreator TV

Kegemarannya dalam menulis, sempat mengantarkan Harso menjadi kreator naskah di stasiun TV. Kini ia menjabat kepala sekolah SMPN 2 Gebang. Bagaimana kisahnya?

Menjadi pendidik tentu tak mudah. Apalagi menjabat kepala sekolah. Berbagai proses untuk menemukannya tak sebentar. Seperti yang dialami Mohamad Suharsono. Pria yang saat ini menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Gebang lebih dahulu menjadi guru selama bertahun-tahun.

Pria yang satu ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP N 2 Gebang sejak tiga tahun lalu. Ia mulai menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2019.

Harso sapaannya, mengampu mata pelajaran pada Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tengahtani yang semula bernama SMP Negeri Cirebon Barat 2 sejak 1998 hingga 2019.

“Di SMP N 1 Tengahtani, saya sudah bolak balik menjadi wakil kepala kurikulum dan kesiswaan,” kata pria lulusan UGJ itu.

Semasa awal berkarir menjadi guru, Harso pernah aktif dalam organisasi keguruan. Ia menjabat Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 hingga 2021.

“Sebelum diangkat jadi kepala sekolah, saya menjadi ketua MGMP selama 2 periode,” ungkap Harso.

Berkat menjadi ketua MGMP, Harso telah berkeliling Indonesia untuk mensosialisasikan kurikulum yang ditentukan pemerintah.

Selain itu, karena kepiawaiannya, Harso pernah ditunjuk





sebagai pembuat konten pendidikan untuk salah satu stasiun TV bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

“Di SCTV hampir satu tahun dan telah tayang. Saya bertugas membuat naskah,” ungkap pemilik hobi bulutangkis dan takraw itu.

Berkat itu, Harso sering diminta menjadi talen pengganti di SCTV. Tak jarang, Harso menuliskan naskah program TV, hingga ia pun memiliki beberapa buku.

“Sekarang saya punya buku novel yang sudah terbit. Sebelumnya saat masih di MGMP saya juga punya buku tantangan siswa,” jelas Harso.

Hobi menulisnya, sudah ia te-

kuni sejak masih menjadi mahasiswa di Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon. Harso menjadi pengisi tulisan di buletin kampus.

“Hobi menulis sejak saat kuliah, karena pada saat itu saya menjadi sekretaris buletin yang mengharuskan saya menambahkan tulisan kosong,” jelas pria berambut cepak tersebut.

Setelah lulus kuliah, Harso pun membuat sanggar seni di Plumbon bernama sanggar citra.

“Kegiatannya tidak hanya drama dan menari, tapi juga menulis puisi dan membaca puisi. Saya juga termasuk anggota dari sanggar seni nara yang ada di Kota Cirebon,” jelas penyuka makanan pedas tersebut.

Meski demikian, Harso lebih memilih mengembangkan hobi menulisnya dibanding seni peran.

“Kalau menulis sih masih tetap berjalan. Karena menulis sudah menjadi hobi saya sejak dulu kuliah,” katanya.

Selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP N 2 Gebang, Harso mengalami beragam asam garam.

“Banyak tantangannya, mulai dari sarana-prasarana sampai kinerja guru yang harus saya urus,” tuturnya menceritakan.

Terlebih faktor geografis SMP N 2 Gebang yang berada jauh dari jangkauan pemerintahan. “Di sini, jarang tamu dinas yang mampir. Kecuali yang sudah menjadi tugasnya baru mau mampir,” katanya.

Namun itu tak membuat Harso patah arang, selama memimpin sekolah, banyak perubahan yang telah ia lakukan. Seperti menyulap halaman sekolah menjadi lebih rapih dan bersih.

“Sebelum saya di sini, kalau musim hujan sekolah tergenang banjir. Tapi sekarang sudah kita rapihkan dengan pasang paping blok,” tandasnya. •Kus



Amo Wijaya Maestro Dalang Wayang Cepak

Hampir 50 tahun, Ki Amo mendalang wayang cepak. Pahit manis pun ia rasakan selama menjadi dalang. Bagaimana kisahnya?

Puluhan tahun, Amo Wijaya, mendalang kesenian wayang cepak khas Cirebon. Ki Amo, sapaannya, merupakan salah satu dalang yang hingga kini masih aktif mengenalkan wayang cepak.

Di usianya yang tak lagi muda, pria kelahiran 1949 Desa Karangtengah, Karangsembung tersebut, masih menggeluti profesinya meski sudah jarang orang yang mengenal wayang cepak.

Sejak tahun 1968, Ki Amo telah menjadi dalang wayang golek cepak. Saat itu, Amo muda sudah dikenalkan cara mendalang oleh ayahnya yang juga

seorang dalang.

Darah seni itu pun mengalir deras dalam diri Amo. Selain ayah, kakek hingga buyut Amo ternyata juga seorang dalang. Tak heran, kecintaannya terhadap wayang cepak begitu besar hingga saat ini.

"Sekarang umur saya 74 tahun. Kalau ada kesempatan untuk tampil saya masih siap," ucap Ki Amo.

Ki Amo sangat menyukai kesenian wayang cepak. Selain untuk mengetahui sejarah zaman dahulu, bagi Ki Amo, melalui wayang cepak turut serta melestarikan warisan leluhur.

Di antara saudara-saudaranya, hanya Ki Amo yang bersedia meneruskan profesi sebagai dalang wayang cepak.

“Saya anak ke 1 dari 5 bersaudara, dan hanya saya yang menjadi dalang. Sekarang saya punya 6 anak, 5 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi tidak ada yang meneruskan menjadi dalang,” ungkap Ki Amo.

Meski demikian, Ki Amo mengaku telah membebaskan anak-anaknya untuk memilih masa depan mereka sendiri.

Selama menjadi dalang, Ki Amo sudah tampil di berbagai tempat. Bukan hanya di Cirebon saja, melainkan hingga luar kota seperti Bandung dan Jakarta.

Saat kesenian wayang masih ramai peminatnya, Ki Amo bahkan pernah tampil di hadapan Presiden Soeharto. Tak salah, jika julukan maestro dalang tersebut tersemat untuk Ki Amo.

“Dulu pernah pentas di luar kota, pada tahun 1981 di Bandung, tahun 1986 di Jakarta, tahun 1987 bersama Pak Soeharto di Taman Ismail Marzuki,” tutur Ki Amo.

Namun beberapa tahun ini, Ki Amo sudah jarang pentas. Kelompok Seni Wayang Cepak Langgeng Kusuma yang ia pimpin pun sepi pengunjung.

Sebelumnya, setiap 1 Muharam, Ki Amo akan tampil di Keraton Kaprabonan. Dia juga kerap pentas di hajatan atau peringatan hari tertentu. Namun, saat ini minat masyarakat terhadap kesenian wayang semakin berkurang.

“Sekarang memang sepi. Lebih banyak yang memilih organ tunggal dibandingkan wayang,” ungkap Ki Amo.

Ia pun sangat menyayangkan hal itu. Padahal kesenian wayang cepak merupakan warisan khas Cirebon yang berbeda dengan wayang golek pada umumnya. Semestinya masyarakat juga turut merawatnya.

Saat ini jumlah dalang semakin sedikit. Belum lagi dengan keadaan mereka yang sudah manula. “Untuk wilayah Cirebon timur, setahu saya hanya ada 2 dalang, saya dan Dalang Etom di Buntet. Yang lainnya su-

dah pada meninggal,” jelasnya.

Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia perdalangan, Ki Amo hanya berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon akan lebih memikirkan generasi dalang wayang cepak.

Kesenian tersebut, harus dikenalkan oleh generasi muda sejak dini, agar wayang cepak tidak punah dan kehilangan peminatnya.

“Saya berharap pemerintah bisa kenalkan wayang di lembaga pendidikan. Entah itu di sekolah atau perguruan tinggi. Pentaskan agar dikenal para pelajar,” harapkan Ki Amo.

Ki Amo merasa yakin, jika wayang cepak bisa masuk ke dunia pendidikan regenerasi akan lebih mudah. Selain itu, generasi muda akan lebih mengenal budaya leluhur seperti wayang cepak ini.

Selain itu, Amo berharap akan lebih banyak sanggar wayang cepak yang didirikan. Sehingga pemuda tidak perlu bingung ketika ingin belajar menjadi dalang. •par



Komisi I Pastikan Bisnis Hiburan Taat Aturan

Komisi I menilai, pendapatan sektor pajak dari bisnis hiburan masih sangat rendah. Selain itu banyak laporan tempat hiburan yang tak jalankan aturan. Seperti apa?



Selama pandemi Covid-19, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kemerosotan tajam. Tak terkecuali bagi pegiat bisnis hiburan. Banyak bisnis hiburan yang merugi hingga harus gulung tikar karena sepi pengunjung.

Beruntungnya di tahun 2024, pemerintah mengumumkan pandemi telah dinyatakan endemi. Akibatnya bisnis hiburan pun saat ini kembali bergeliat. Salah satunya tempat hiburan karaoke.

Menanggapi kembali bergeliatnya bisnis hiburan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaudit lokasi hiburan untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Tarseni mengatakan, perkembangan dan kondusifitas tempat hiburan harus dipastikan setelah pandemi berakhir. Karena akan berdampak terhadap PAD Kabupaten Cirebon.

“Selama pandemi Covid, PAD kita turun. Jadi kedepan, dengan berakhirnya pagebluk ini kita harapkan PAD Kabupaten Cirebon akan maksimal,” ujar Tarseni saat mengunjungi Diva Karaoke Family, yang berada di Kecamatan Kedawung.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Syahril Romadhony menilai, pajak hiburan di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah dengan kisaran Rp 70 juta per tahun.

“Ini pajaknya sangat rendah, bahkan enggak sampai Rp 100 juta. Padahal kita punya banyak tempat hiburan,” jelasnya.

Politisi PDIP itu pun mempertanyakan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait penegakan perda pajak hiburan.

“Karena kecil sekali pajaknya, mungkin kita akan panggil Bapenda untuk mensinkronkan penerapan pajak hiburan dengan kondisi di lapangan,” tuturnya.



Pasalnya, saat ini bisnis perhotelan dan hiburan di Kabupaten Cirebon mulai ramai kembali. Dari semula pengunjung di bawah 50 %, meningkat rerata 70 persen dalam sepekan.

“Artinya ekonomi di Kabupaten Cirebon sudah mulai stabil. Kita pengen tahu kondisi yang ada di Diva ini apakah sesuai dengan laporan dari masyarakat,” ujar Doni.

Doni menerangkan, DPRD menerima laporan dari masyarakat adanya penjualan minu-

man beralkohol di Diva Karaoke Family dan seringnya terjadi keributan hingga banyak perempuan yang bekerja melebihi batas waktu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Dadang Priyono juga mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai para pemandu lagu (PL) atau *lady companion* (LC) yang meresahkan. Oleh karenanya, Dadang meminta agar pihak Diva Karaoke bisa menertibkan.

“Di Diva ini kan tidak menye-

diakan pemandu lagu atau LC, tetapi banyak yang nongkrong di depan. Itu kami minta tolong ditertibkan,” kata Dadang.

Dadang juga meminta agar seluruh pengelola hiburan wajib berkoordinasi dengan DPRD dan Pemkab Cirebon agar bisa bersama menjaga ketertiban.

“Karena Ini bisa merusak citra dari Diva Karaoke sendiri,” jelasnya.

Menanggapi itu, pihak Diva Karaoke Family yang diwakili Indi mengakui banyak komplek mengenai para PL karena sering memaksa para pengunjung.

“Ini memang sangat mengganggu kami. Bahkan ada yang menawarkan sampai masuk ke dalam ruangan. Kami meminta kerjasama dengan Satpol PP untuk bantu menangani karena kami tentu tidak sanggup,” ungkapnya.

Sementara mengenai laporan minuman keras beralkohol, Diva Karaoke Family hanya menjual minuman alkohol yang diperbolehkan secara aturan.

“Untuk minuman alkohol kita sudah punya izin menjualnya yang diperbolehkan. Hanya minuman yang maksimal punya kadar alkohol 5 persen. Kalau yang melebihi itu kita tidak menjual. Kami sangat taat terhadap aturan,” kata Indi.

Indi juga mengatakan, Diva Karaoke Family selalu berkoordinasi dengan jajaran Polsek Kedawung mengenai ketertiban. Bahkan setiap Sabtu malam, pihak pengelola selalu patroli untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

“Kita ucapkan terima kasih atas kunjungan kerja kali ini. Kedepan, kita akan terus berkoordinasi dengan dinas dan *stakeholder* lain agar bisa patroli bareng,” tandasnya. •Kus

Sosialisasi Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila

DPRD menilai, kehadiran perda Pendidikan Ideologi Pancasila menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Seperti apa?



Rancangan peraturan daerah (raperda) Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP) dan wawasan kebangsaan (wasbang) yang diinisiasi DPRD pada November 2022 silam, terus dikejar agar segera disahkan.

DPRD Kabupaten Cirebon menargetkan raperda PIP akan disahkan menjadi perda pada tahun 2024. DPRD menilai, kehadiran raperda PIP dan Wasbang sangat penting sebagai upaya peningkatan pengamalan pancasila, membina kerukunan, dan toleransi masyarakat. Sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat yang berkarakter unggul dan berjiwa pancasila.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori mengatakan, saat ini raperda PIP terus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dikaji panitia khusus (pansus).

“Momentumnya memang perda ini menjadi inisiatif kami yang harus diselesaikan di tahun 2024. Bagi kami itu sangat penting,” ujar Hasan, saat mengisi sosialisasi raperda PIP di Kantor Kecamatan Beber, Desember 2022.

Mengingat hidup berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah, kata Hasan, raperda PIP penting untuk menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

Politisi Fraksi PKB itu pun berpendapat, perda PIP sangat penting khususnya bagi generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Pasalnya, perkembangan zaman yang pesat maka akan semakin besar tantangan ke depan.

“Kita melihat adanya tantangan-tantangan besar yang akan dihadapi oleh anak-anak generasi milenial dan generasi z. Apalagi kita akan menyambut



tahun politik,” tutur Hasan.

Dia menyampaikan, tantangan bisa datang dari mana saja. Yang pasti tantangan tersebut, bukan tidak mungkin akan merusak masa depan bangsa, jika generasi muda tidak memiliki wawasan kebangsaan.

Menurutnya, wawasan kebangsaan memiliki 4 pilar yang perlu ditanamkan dalam setiap jiwa generasi muda meliputi: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Oleh karenanya, sudah seharusnya, pemerintah daerah serius memikirkan perkembangan pengetahuan generasi muda

agar tidak kehilangan nilai kebangsaan pada hidupnya.

“Kita mendorong pemerintah daerah lebih serius memikirkan atau melaksanakan penanaman dan penguatan kembali ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, khususnya kepada generasi muda,” tambahnya.

Kehadiran payung hukum tersebut, sejalan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Ideologi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara. Sehingga diperlukan agar nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pemikiran setiap warga negara.

Senada itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno optimistis raperda PIP dan Wasbang akan secepatnya diproses menjadi perda.

Menurutnya, raperda ini sudah seharusnya segera disahkan. Hal ini mengingat kehidupan keseharian bermasyarakat di Kabupaten Cirebon sedang mengalami degradasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kelompok berandalan Geng Motor dan kenakalan remaja di beberapa wilayah.

Politisi Gerindra itu juga menyampaikan, sosialisasi raperda PIP sekaligus menjadi momen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan menampung ide-ide dari tokoh sekaligus anak muda setempat.

“Sebelum disahkan menjadi perda, raperda inisiatif ini kami lakukan sosialisasi ke masyarakat, sekaligus menampung usulan-usulan untuk melengkapinya,” kata Cakra.

Setelah ide-ide dan aspirasi dari masyarakat tertampung, selanjutnya akan dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah daerah. Mana saja yang bisa masuk ke perda, dan relevan dengan kebutuhan perda.

Sosialisasi tersebut sebagai bentuk kontrol pemerintah daerah dengan kondisi di lapangan. Sehingga perda akan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Cakra berharap setelah raperda ini disahkan, masyarakat khususnya generasi muda akan lebih peka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mampu menanamkan 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka tunggal Ika. Kita berharap itu,” tandasnya. •par

Komisi II Minta PLN Cirebon Tingkatkan Setor Pajak

Capaian pajak penerangan jalan dari PLN UP3 Cirebon dinilai masih jauh dari harapan. Komisi II minta agar PLN tingkatkan sektor pajak hingga Rp 96 miliar. Bagaimana upayanya?



Dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.

Kunjungan tersebut, dalam rangka meninjau realisasi setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) selama tahun 2022. Komisi II juga berkeinginan mengetahui program yang telah dijalankan PLN UP3 Cirebon terhadap masyarakat.

Manajer UP3 PLN Cirebon Roni Afrianto mengatakan, per Oktober 2022, PPJ yang telah disetorkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mencapai Rp 84,671 miliar.

Sementara berkaitan program, Roni menerangkan, PLN Kabupaten Cirebon telah memberikan bantuan CSR ke beberapa lembaga pendidikan. Salah satunya untuk pembangunan madrasah Pon-

dok Pesantren Al-Falah Desa Tuk senilai Rp 100 juta.

Selain itu, PLN juga membantu pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Yayasan Bakti Caruban Desa Gronggong. Selanjutnya, pemberian kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 50 juta kepada Yayasan Insan Peduli, Singdangjawa dan Yayasan Makarimal Akhlak, Desa Waruduwur.

PLN UP3 Cirebon juga mendorong masyarakat sekitar melalui program penggunaan kompor industri, *icconnect* hingga kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

"Semua kantor PLN di Kabupaten Cirebon sudah tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Jadi kendaraan listrik bisa isi ulang di situ," jelas Roni.

Roni menyampaikan, sinergi yang baik antara PLN UP3 Cirebon dengan pemda akan terus terjalin.



Ia pun meminta agar pemda terus membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembayaran listrik tepat waktu. Selain itu, Roni berharap, agar pemda turut mengamankan kondisi pohon untuk mendukung kelancaran pasokan listrik.

Sejauh ini, persediaan daya listrik di wilayah kerja PLN UP3 Cirebon sebesar 170 MVA. Persediaan itu berasal dari beberapa induk PLN yang terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Babakan, Kecamatan Sunyaragi dan Kecamatan Mandirancan. Roni mengklaim jangkauan listrik telah mencapai 99

persen di Kabupaten Cirebon.

“Sisa 1 persennya hanya warga yang baru membangun rumah. Sehingga belum mendapat layanan listrik,” ungkap Roni.

PLN UP3 Cirebon juga telah mampu menjangkau persediaan listrik untuk kawasan industri. Bahkan, ketersediaan tersebut mampu memenuhi sektor industri kedepan yang akan dibangun.

Roni menuturkan, PLN UP3 Cirebon berkomitmen untuk terus memberikan sumbangsih dalam optimalisasi PAD dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tiap tahun.

Oleh karenanya, ia berharap

pemda dapat memberikan informasi rencana pembangunan perumahan daerah bisnis untuk menyiapkan rencana perluasan jaringan listrik.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi mengatakan, meski pelayanan listrik diakui cukup baik, sektor pajak PPJ PLN UP3 Cirebon belum mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal dalam dua bulan terakhir jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.

Menurutnya, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan besar negara. Oleh karenanya, Pandi meminta PLN UP3 Cirebon dapat meningkatkan setoran PPJ hingga Rp 96 miliar.

“Kenaikan setoran PPJ tahun 2022 ini sudah kami bahas dan putuskan dalam rapat banggar,” ujar Pandi.

Sementara mengenai informasi rencana pembangunan Kabupaten Cirebon, Pandi menyarankan PLN UP3 Cirebon agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).

“Kalau gambaran umumnya kawasan pabrik akan dibangun di wilayah Kecamatan Mundu, Pabedilan dan Losari. Sedangkan kawasan perumahan di daerah Tengah Tani dan Kapetakan,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Bashori juga meminta, PLN harus bersinergi mendukung program pembangunan Kabupaten Cirebon. Misalnya untuk pembangunan jalan, sekolah dan pemberian obat yang selama ini belum ter-cover.

“Kami berharap PLN dan Pemkab Cirebon dapat menyatukan visi CSR untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Minimal 40 persen dari dana CSR bisa bantu pemda,” ujar Hasan. •**Muizz**

Soroti Sistem Rujukan Puskesmas Losari

Mendapat laporan warga perbatasan Losari yang memilih berobat ke rumah sakit Brebes, Komisi IV ingatkan Puskesmas Losari. Seperti apa?



Foto: Radar Cirebon

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menerima laporan banyak warga Losari perbatasan yang memilih berobat di rumah sakit wilayah Brebes. Dugaan sementara, karena tak mendapat rujukan dari Puskesmas Losari.

Padahal komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon telah menginstruksikan seluruh Puskesmas, agar pasien yang akan dirujuk harus memilih rumah sakit di Kabupaten Cirebon.

“Kita sudah instruksikan untuk di rujuk ke rumah sakit kabupaten dalam hal ini Rumah sakit Waled,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan.

Aan mengaku telah meminta pihak Rumah sakit Waled untuk melengkapi dan mengoptimalkan alat-alat medis serta pelayanan agar pasien yang berobat bisa merasa aman dan nyaman.

“Peralatan RSUD Waled sudah lengkap semua, makanya kami arahkan rujukannya harus ke Waled,” ungkap Aan.

Aan pun meminta penjelasan Puskesmas Losari mengapa masih banyak warga yang memilih berobat di Brebes.

“Kira-kira ada berapa persen, dan sistem rujukanya seperti apa?” tanya Aan.

Menanggapi itu, Kepala Puskesmas Losari Juju Juarsa membenarkan masih ada pasien yang berobat ke Rumah sakit Mutiara Bunda. Namun itu bukan karena rujukan dari Puskesmas Losari.

“Mereka bisa langsung ke Rumah sakit Mutiara Bunda tanpa rujukan dari kami,” ujarnya.

Salah seorang pegawai Puskesmas Losari yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pasien yang memilih rujuk ke Rumah Sakit di Brebes ke-

banyak wanita hamil.

“Kita sudah informasikan untuk ke RSUD Waled, kalau pasien tetap maksa ke mutiara bunda, maka rujukan tidak keluar,” ujarnya.

Saat ini semua rujukan telah diarahkan ke RSUD Waled, sehingga tidak ada lagi yang akses ke Jawa Tengah. Namun kendalanya, RSUD Waled membatasi total pasien yang hanya menerima 15 persen dari Puskesmas.

“Ada lagi keluhan pasien di RSUD Waled yang harus bolak-balik minta rujukan karena adanya penyakit yang berbeda, Padahal prosedurnya tidak seperti itu, seharusnya BPJS bisa meminta rujukan internal di rumah sakit itu,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati mengamini masih banyak laporan buruk tentang pelayanan rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit ke RSUD di Kabupaten Cirebon.

“Orang sakit butuh kenyamanan, sementara RSUD kita tidak bisa bikin nyaman pasien,” kata Nana.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nurholis menyarankan Puskesmas Losari agar terus mengontrol pasien yang meminta rujukan. “Puskesmas harus memanfaatkan fasilitas dari pemkab, agar semua bisa terpantau,” ujarnya.

Aan pun mengingatkan agar Puskesmas Losari terus mendorong pasien merujuk ke RSUD Waled. Sementara mengenai laporan warga yang merasa kurang nyaman ketika berobat ke RSUD Waled, ia berjanji akan membenahi dan mengaudit sistem pelayanan.

“Setelah dari sini, saya akan



menindaklanjuti ke RSUD Waled. Saya ingin tahu sistem rujukan dan pelayanannya seperti apa. Kita sangat miris kalau tahu

banyak warga yang lebih milih berobat ke Jawa Tengah karena pelayanan di RSUD Waled buruk,” pungkasnya. •Kus

Dulu Tempat Buang Limbah, Sekarang Jadi Taman Indah

Taman Muara Mundu didirikan setelah normalisasi sungai dan berkat kunjungan presiden pada 2022 silam. Sekarang jadi wisata baru yang indah. Seperti apa?



Terletak di pesisir pantai utara Cirebon Jawa Barat, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, selalu menampilkan wajah baru wisata. Sebuah taman cantik berdiri yang berpadu dengan wisata mangrove bernama Taman Muara Mundu Pesisir.

Sebelum menjadi taman yang indah, lokasi tersebut semula hanya tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah hasil laut. Para warga juga mengeluhkan pendangkalan muara sungai yang membuat perahu nelayan tak bisa melintas.

Pada awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo berencana akan berkunjung ke Desa Mundu Pesisir sebelum meresmikan tol di Semarang. Lantas nor-

malisasi sungai pun dilakukan untuk menyambut kedatangan presiden.

“Waktu itu Presiden Jokowi akan meresmikan tol di Semarang. Kebetulan mampir dulu ke Mundu Pesisir. Jadi saya langsung ngomong ke Jokowi untuk normalisasi muara mundu,” ujar Haerun, Kuwu Desa Mundu Pesisir.

Setelah normalisasi sungai selesai, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkeinginan agar setiap pembangunan memiliki nilai estetika. Akhirnya sebuah taman pun dibangun dan mulai diresmikan pada akhir 2022.

“Alhamdulillah setelah dinormalisasi, desa kami memiliki taman yang indah dan bisa digunakan un-



tuk spot selfie dan wisata keluarga,” ungkap Haerun.

Saat ini taman muara munda sudah beroperasi dan dikelola langsung oleh badan usaha milik desa (Bumdes) Munda Pesisir dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Pernah waktu masih liburan jumlah wisatawan yang masuk sampai hampir seribu pengunjung dalam waktu kurang dari 1 minggu,” kata Haerun.

Bagi pengunjung yang akan memasuki Taman Muara Munda akan dikenakan biaya masuk atau karcis sebesar Rp 5 ribu dengan *include* Taman Mangrove Kasih Sayang.

“Dengan membayar karcis, para pengunjung juga boleh memasuki wisata mangrove. Memang kita ingin wisata ini bisa terintegrasi dengan wisata mangrove,” tuturnya.

Meski demikian, Ketua Pokdarwis Desa Munda Pesisir Eko Winarno mengatakan, masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki dan dilengkapi agar Taman Muara Munda ini menjadi wisata yang aman dan nyaman bagi para pengunjung.

“Kita masih banyak kekurangan. Seperti belum ada fasilitas MCK, serta fasilitas pendukung lain untuk berteduh,” ujar Eko.

Oleh karenanya, Pokdarwis dan Pemdes Munda telah berencana membangun MCK dan saung-saung UMKM di sekitar lokasi taman.

“Kita akan bikin sekitar 6 saung agar pengunjung bisa beristirahat setelah selesai berkeliling di Taman Muara Munda ini. MCK juga sebentar lagi akan dibangun bersamaan dengan saung untuk para pelaku UMKM,” ungkapnya.

Selain fasilitas penunjang, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemdes dan pokdarwis, yakni keadaan jalan penghubung dari taman menuju wisata mangrove yang saat ini aksesnya masih rusak.

“Jarak dari Taman Muara Munda ke Mangrove Kasih Sayang itu sekitar 400 meter. Kita berencana membangun jalan dari bibir pantai,” jelasnya.

Eko berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon terus membantu kebutuhan fasilitas Taman Muara Munda agar menjadi wisata yang layak.

“Kita sudah dapat kucuran dari dinas Rp 200 juta dan dari pemdes. Tapi tentu kita masih banyak yang harus diperbaiki agar wisata ini bisa semakin diminati dan mampu meningkatkan ekonomi warga sekitar,” tandas Eko. •Kus

Rawaurip

Punya Aplikasi Pelayanan Digital

Desa Digital menjadi salah satu program Pemdes Rawaurip sejak 2015.
Meski masih merangkak, pemdes yakin akan terwujud?



Belum lama, Pemerintah Desa (Pemdes) Rawaurip, Kecamatan Pangenan, tengah mengembangkan sebuah sistem aplikasi pelayanan daring. Dimana aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan administrasi di desa.

Aplikasi tersebut, bernama 'Smart Government' yang berguna untuk menunjang pelayanan. Terdapat fitur tanda tangan digital berbentuk *barcode* sebagai ganti tanda tangan basah.

"Jadi enggak susah-susah

ngantri tanda tangan surat. Sekarang masih tahap sosialisasi pelayanan daring ini. Untuk pelayanan manual masih kita buka. Sedikit-demi sedikit akan kita alihkan ke aplikasi," ujar Sekretaris Desa Rawaurip Purnama Wahyudi.

Yudi menjelaskan, Pemdes Rawaurip terus berinovasi menjadi desa digital sejak 2015 silam. Salah satunya dibuktikan dengan meluncurkan pelayanan digital agar segala kebutuhan administrasi cukup diakses melalui gawai.

"Masyarakat bisa akses dari rumah kalau mau bikin surat dan pengambilan bentuk fisiknya bisa dicetak dimanapun. Misalnya pembuatan surat keterangan usaha (SKU)," jelas Yudi.

Dalam mengembangkan desa digital ini, Pemdes Rawaurip telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 30 juta untuk pembuatan dan perawatan aplikasi.

Agar semakin memudahkan, Pemdes Rawaurip juga menyiapkan perangkat desa yang siap membantu warga menggunakan aplikasi.

"Kami sudah sediakan admin di desa. Selain untuk melakukan verifikasi data aplikasi yang masuk ke sistem, admin juga membantu warga yang datang langsung ke desa," tutur Yudi.

Meski demikian, diakui sistem tersebut belum sepenuhnya mutakhir. Diperlukan penambahan fitur lain agar semakin optimal.

"Seperti kemudahan pendaftaran dengan e-KTP dan aplikasi yang bisa terkoneksi dengan CCTV desa. Itu sedang kita kembangkan," ungkap Yudi.

Yudi berharap, dengan adanya sistem digital akan mempermudah pelayanan publik dari tingkat desa.

"Meski mungkin sulit. Kita berharap aplikasi ini bisa terkoneksi dengan dinas agar kedepan semakin mempermudah lagi," pungkasnya. •Kus

Gumulung Tonggoh

Kembangkan Sentra Peternakan

Realisasikan program ketahanan pangan, Pemdes Gumulung Tonggoh akan sulap lahan kosong menjadi peternakan. Seperti apa?

Pemerintah Desa Gumulung Tonggoh tengah serius meningkatkan program ketahanan pangan dengan membuat peternakan guna meningkatkan pendapatan dan kebutuhan daging di desa.

Lahan milik desa seluas satu hektare telah disiapkan untuk disulap menjadi peternakan. Menurut Kuwu Desa Gumulung Tonggoh Agus Saefudin, program ini nantinya dikelola masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Nanti yang mengelola dan mengembangkan adalah masyarakat melalui Bumdes dari dana penyerta modal desa. Nanti akan dibahas pada musdes,” ujarnya.

Agus menjelaskan, program ini sesuai hasil kesepakatan musyawarah bersama semua pihak. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes).

“Banyak masyarakat Gumulung Tonggoh yang berkorban hewan sapi setiap Idul Adha. Itu jadi alasan kami mengembangkan usaha peternakan sapi dan kambing. Karena berpotensi meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, ungkap Agus, program usaha peternakan sapi sedang dalam tahap pembangunan kandang. Di awal tahun



2024, desa akan membeli 10 ekor sapi untuk ditanak.

“Semoga usaha peternakan sapi ini akan berkembang. Sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, Agus mengaku dalam mengembangkan usaha peternakan tidaklah mudah. Untuk itu dia berharap pemerintah daerah terus mendampingi pemdes.

Sebelumnya, Pemdes Gumulung Tonggoh lebih dahulu memiliki usaha peternakan ayam telur. Hasil produksinya

dipasarkan ke masyarakat Gumulung Tonggoh dengan harga yang lebih murah.

Namun, faktor cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu, membuat banyak ayam petelur tak bisa bertahan hidup. Sehingga hasil peternakannya tidak maksimal.

“Saat ini tinggal sekitar 150 dari 336 ayam petelur yang kami miliki di awal tahun. Itu karena cuaca di beberapa bulan kemarin tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Kan tidak bagus untuk peternakan ayam,” pungkasnya. •Iz

Panguragan Bakal Benahi Situs Nyimas Gandasari

Pemdes Panguragan berupaya mengembangkan Situs Keramat Nyimas Gandasari
Sebagai destinasi wisata religi. Bagaimana langkahnya?



Ekstensi Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan tak terlepas dari sosok Nyi Ratu Mas (Nyimas) Gandasari, sosok perempuan penyebar agama Islam sekaligus pendiri desa. Hingga kini, makam keramat Nyimas Gandasari pun selalu ramai dari peziarah.

Namun di balik ramainya peziarah, situs makam Nyimas Gandasari dinilai belum tertata rapi. Untuk bisa ke situs, para peziarah diharuskan berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer, karena belum tersedia akses untuk

kendaraan.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Panguragan tak ingin tinggal diam. Kuwu Desa Panguragan Mulyadi mengatakan, agar lebih mudah diakses pengunjung, ia telah berkolaborasi bersama Desa Panguragan Kulon. Seperti diketahui, sebelumnya para peziarah harus memarkir kendaraannya di lahan kosong milik Pemerintah Desa Panguragan Kulon.

"Kedepannya para peziarah tidak perlu lagi berjalan kaki, karena akan kita sediakan ken-

daraan wisata yang bisa digunakan mengantar mereka ke lokasi ziarah," kata Mulyadi.

Mulyadi menuturkan, selain untuk menjaga situs religi terawat, upaya tersebut ia lakukan agar desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Mulyadi menjelaskan, melalui pengembangan kawasan wisata diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, pria berusia 53 tahun itu menyadari, penataan kawasan situs makam Nyimas Gandasari tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mulyadi berharap, estapet pembangunan yang telah dicanangkan akan terus berlanjut. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri.

"Kita meyakini kalau wisata religi ini bisa dikembangkan akan beriringan dengan pendapatan desa. Karena kehadiran wisatawan religi," jelasnya.

Sebelumnya, Pemdes Panguragan lebih dahulu memiliki program prioritas seperti digitalisasi pelayanan.

"Masyarakat yang membutuhkan dokumen maupun administrasi tak perlu mengantre lama. Tidak kurang dari satu menit sudah selesai," tandas Mulyadi. •Mir

Curug

Raih Penghargaan Penanganan Sampah

Berkat kehadiran perdes sampah, Desa Curug berhasil atasi sampah warga hingga sabet penghargaan. Bagaimana caranya?

Sebelum Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak menjadi wilayah yang memiliki persoalan sampah. Tak ada lokasi untuk pembuangan sampah rumah tangga.

Namun keadaan itu mulai berubah sejak dapuk kepemimpinan desa diganti. Kuwu Desa Curug Siti Kurniaminati yang mulai menjabat pada 2018 silam, meluncurkan program penanganan sampah. Salah satunya dengan menyediakan 150 tong sampah dan 10 *arm roll* (bak sampah) di beberapa titik strategis.

“Saya siapkan wadahnya untuk memudahkan pengumpulan sampah rumah tangga,” ujar Siti.

Gayung bersambut oleh warga. Tawaran konsep program tersebut berangsur menyelesaikan persoalan sampah yang berserakan. Dalam sehari, sebanyak 5 ton sampah rumah tangga berhasil ditangani. Namun ada persoalan lain datang.

“Waktu itu kita belum mikirin gimana untuk bayar petugas yang akan angkut sampah dan membersihkan tong sampah karena belum ada iuran,” ungkap Siti.

Setelah bermusyawarah, pemerintah desa pun membuat kebijakan iuran. “Disambut baik warga, namun saat itu kami masih menggunakan sistem *kencleng* (iuran seadanya) untuk retribusi,” tuturnya.



Dirasa kurang efektif menggunakan sistem tersebut, tahun 2020, Pemdes Curug menginisiasi terbentuknya peraturan desa (perdes). Perdes tersebut mengatur semua sistem penanganan dan pengelolaan sampah. Mulai dari retribusi hingga jadwal pengangkutan dan biaya penanganannya.

Terdapat kewajiban desa yang tertulis untuk menyiapkan fasilitas pengangkutan sampah. Sedangkan untuk warga diharuskan membayar retribusi sesuai dengan kategori penghasilan.

“Di perdes diatur bahwa sampah rumah tangga dikenakan retribusi Rp 10-20 ribu tergan-

tung kategorinya,” ungkap Siti.

Selain kategori rumah tangga, Perdes juga mengatur retribusi khusus bagi pemilik usaha, lembaga pendidikan, pemerintahan hingga warga yang akan menggelar kegiatan.

Berkat upaya itu, Desa Curug berhasil menyabet penghargaan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten sebagai kategori desa yang mampu menangani sampah.

“Memang konsep ini diambil dari berbagai negara seperti Jepang dan Belanda. Saya dan suami mempelajari dari negara-negara tersebut dan menerapkannya melalui perdes,” kata Siti. •Soy



Negeri Empal Gentong

Seiring kami mendapat kunjungan dari DPRD kabupaten/kota lain. Di sela obrolan serius, biasanya selalu kami sisipkan perbincangan ringan seputar kuliner Cirebon. Promosi lah begitu. Suatu ketika ada tamu yang cukup kritis, dia bertanya:

“Pak kenapa masakan yang seperti gulai di Cirebon itu namanya empal gentong? Bukankah empal itu daging sapi yang diiris tipis lalu digoreng?”

Wajar sih orang bertanya seperti itu. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan empal seperti itu. Tapi sebagai tuan rumah kita harus siap dengan pertanyaan kritis, terlebih pertanyaan terhadap kekhasan daerah.

Kami jelaskan bahwa empal itu adalah daging yang empuk. Nah, nama di belakangnya merujuk pada proses atau metode pengempukan daging. Di daerah lain ada *empal gepuk*. Wujudnya daging sapi goreng. Metode pengempukannya dengan di-*gepuk* (ditumbuk atau dipukul dengan benda tumpul). Jadilah namanya empal gepuk.

Sedangkan di Cirebon, daging diempukkan dengan cara direbus di dalam gentong selama beberapa jam. Untuk itulah namanya empal gentong. Di Cirebon yang diempukkan bukan hanya daging, tapi juga kikil, jeroan dan kepala.

Menariknya, empal gentong sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Pemerintah Jawa Barat, pada 2 Februari 2022. Sementara, di pemerintah pusat, sejak Januari 2016, statusnya baru tercatat sebagai WBTB, belum ditetapkan sebagai WBTB.

Nah, silakan kalau sebelumnya menikmati empal gentong hanya sebagai kulineran; sekarang nikmatilah empal gentong sebagai sajian warisan budaya. Adakah perbedaan rasa?

Kalau belum ada bedanya, mari saya tambahkan narasi penambah kelezatannya. Empal gentong konon berdasarkan cerita rakyat sudah ada sejak tahun 1400-an, atau abad ke-15.

Sebagai pusat perdagangan kala itu, pelabuhan Cirebon adalah tempat bertemunya para saudagar

dari Arab, Cina, India, Jawa, dan lokal Cirebon. Empal gentong adalah representasi gabungan masakan atau bumbu dari kelima budaya itu.

Karena lahir dari peradaban yang cukup tua, empal gentong pun sarat filosofi. Daging yang empuk diibaratkan sebagai manusia. Bahwa manusia adalah seonggok daging yang lemah tanpa daya. Untuk itu manusia tak perlu sombong.

Seonggok daging itu memiliki rasa ketika disajikan dengan kuah bumbu. Begitupun manusia, dia akan bermartabat ketika dalam kehidupannya mengusung nilai sosial, budaya, dan agama. Jadi, bumbu ini pengibaratan nilai yang harus menyelimuti bahkan terserap di dalam diri manusia.

Semakin bumbu itu meresap ke dalam daging, rasa empal gentong semakin enak. Manusia pun begitu, semakin nilai menginternalisasi dan diamalkan dia semakin bermartabat.

Sedangkan gentong adalah pengibaratan dari aturan kerajaan, negara, atau pemerintah. Kumpulan manusia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di sebuah pemerintahan. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

Daging tidak akan empuk, jika di luar gentong. Jika ada sebagian di dalam gentong dan sebagian di luar gentong maka akan terjadi kekacauan rasa, yang satu empuk yang lainnya alot. Lebih parah lagi, jika gentong itu pecah, maka tidak akan daging itu menjadi masakan bernama empal gentong.

Pelajarannya, manusia harus taat dengan aturan pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi terburuknya, negara itu bisa bubar.

Sahabat, mari kita nikmati empal gentong sebagai warisan budaya dan melestarikannya. Oh ya jangan lupa, ketika menikmatinya sadarlah tentang diri yang lemah dan pentingnya mengusung nilai dan menjadi pribadi yang taat.

Mari kita jadi Kabupaten Cirebon, dan Indonesia, menjadi negeri yang bermartabat, seperti halnya negeri empal gentong.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ayo Wujudkan CIREBON BEBAS SAMPAH

- ✓ Perda Khusus Pengelolaan Sampah
- ✓ Pembangunan TPA & TPS Desa
- ✓ Budaya Hidup Bersih



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ayo Dukung CIREBON BEBAS BANJIR

- ✓ Perda Khusus Penanganan Banjir
- ✓ Normalisasi Daerah Aliran Sungai
- ✓ Gerakan Masyarakat Sumur Resapan